

Laporan Triwulan II Tahun 2020

Sekretariat IMDFF-DR (Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery)



April-Juni, 2020

Daftar Isi

I-	LATAR BELAKANG.....	3
II-	RENCANA TRANSISI IMDFF-DR MENJADI IDMF	5
II.1.	PELAKSANAAN STRATEGI TRANSISI IMDFF-DR MENJADI IDMF.....	5
	II.2. STATUS PADA TRIWULAN II-2020 DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT UNTUK TRIWULAN III-2020.....	8
III-	PENGELOLAAN DAN PENGUATAN SEKRETARIAT DI BNPB.....	11
IV-	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH IMDFF-DR.....	13
V-	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGELOLAAN HIBAH LAINNYA.....	17
VI-	KOORDINASI INTERNAL DAN PELAPORAN.....	19
VII-	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT PADA TRIWULAN III-2020.....	25
VIII-	LAPORAN KEUANGAN PROYEK ENSURE TRIWULAN II TAHUN 2020 DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN SEKRETARIAT IMDFF-DR.....	31

I- Latar Belakang

Berdasarkan capaian pada Triwulan I tahun 2020 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II-2020, maka laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR pada Triwulan II (periode April – Juni) tahun 2020 secara garis besar adalah sebagai berikut ini:

1. Transisi IMDFF-DR menuju The Indonesia Disaster Management Fund

Pada Triwulan II-2020 belum terdapat perubahan fungsi dan kelembagaan IMDFF-DR, sehubungan dengan revisi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana;

2. Aspek Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB

Pada prinsipnya, penguatan peran Sekretariat di BNPB terkait erat dengan payung hukum pembentukan the Indonesia Disaster Management Fund;

3. Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Dukungan untuk Sekretariat di BNPB masih perlu dilanjutkan untuk membantu BNPB selaku Executing Agency dalam melaksanakan koordinasi, sinergi dan pelaporan kepada Tim Teknis karena belum tuntasnya kegiatan pemulihan pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah dan daerah lainnya;

4. Koordinasi dan Fasilitasi Penerimaan Hibah Lainnya

Pada akhir Triwulan II-2020, rencana penerimaan hibah dari Pemerintah Qatar sedang dalam proses pembahasan Nota Kesepakatan dan daftar kegiatan yang akan disepakati dengan BNPB, sedangkan rencana penerimaan hibah dari Pemerintah New Zealand belum diproses BNPB.

Tabel berikut ini merupakan rencana kerja IMDFF-DR pada tahun 2020, yang telah disampaikan pada Laporan Triwulan I-2020, yaitu sebagai berikut:

No	Deskripsi Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Rencana Transisi IMDFF-DR menuju IDMF												
1	Strategi perubahan IMDFF-DR												
2	Rekomendasi Tindak Lanjut												
B	Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat												
1	Pembaruan IMDFF-DR												
2	Pembaruan Organisasi Sekretariat												
3	Pembaruan Pedoman pengelolaan												
4	Pengelolaan situs IMDFF-DR												
5	Penyusunan materi publikasi												
C	Pengendalian Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR												
1	Pemantauan existing Project												
2	Pemantauan hibah lainnya (bila ada)												
3	Review Laporan Implementing Agency												
4	Pengakhiran ENSURE project 2020												
D	Rencana Penerimaan Hibah												
1	Reviu substansi usulan Qatar												
2	Reviu substansi usulan NZ												
3	Pembahasan draft MoU/NPH												
4	Reviu Usulan Donor lainnya (bila ada)												
5	Donor Coordination untuk penggalangan dana												
E	Koordinasi internal dan pelaporan												
1	Rapat Sekretariat (bulanan)	□	□		□	□	□	□	□		□	□	
2	Rapat Tim Teknis (per triwulan)						□						
3	Rapat Tim Pengarah (per semester)						■						
4	Pelaporan (Triwulan, Tahunan)				●			●			●		●

Uraian selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan rencana kerja IMDFF-DR pada Triwulan II (April-Juni) tahun 2020 serta rekomendasi tindak lanjut untuk pelaksanaan rencana kerja pada Triwulan III (Juli-September) tahun 2020.

II- Rencana Transisi IMDFF-DR menjadi IDMF

Laporan pelaksanaan rencana kerja transisi IMDFF-DR menjadi IDMF terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu 1) pelaksanaan strategi transisi IMDFF-DR menjadi IDMF, dan 2) pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut pada Triwulan I-2020. Pada tanggal 14 Mei 2020, Biro Hukum Bappenas menyampaikan Salinan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk Kegiatan Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Tahun 2020, diantaranya adalah Pembentukan Tim Koordinasi Strategis **Lembaga** Pengelola Pendanaan Penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan dalam SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020. Mengingat pembentukan Tim Koordinasi dimaksud belum sesuai dengan tujuan transformasi IMDFF-DR menjadi IDMF, maka dalam pembahasan internal di Bappenas akhirnya disepakati bahwa SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020 perlu direvisi karena IMDFF-DR tidak direncanakan bertransformasi menjadi Lembaga Pendanaan Penanggulangan Bencana, melainkan menjadi instrumen koordinasi pengelolaan hibah penanggulangan bencana yang merupakan kolaborasi strategis Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

II.1. Pelaksanaan strategi transisi IMDFF-DR menjadi IDMF

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas telah menyampaikan draft SK pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana kepada Biro Hukum Bappenas pada tanggal 15 Januari 2020,

untuk dievaluasi dan dikoreksi Biro Hukum sesuai format yang berlaku di Bappenas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bappenas, format pembentukan Tim Koordinasi/Tim Koordinasi Strategis/Tim Kajian terdiri dari para pejabat yang ditugaskan sebagai 1) Tim Pengarah, 2) Penanggung Jawab dan 3) Tim Pelaksana.

Pelaksanaan strategi perubahan IMDFF-DR menuju IDMF pada Triwulan II-2020 berdasarkan aspek pendukung strategis adalah sebagai berikut:

Aspek payung hukum	
MoU antara Pemerintah-United Nations dan World Bank tentang IMDFF-DR tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • IMDFF-DR adalah Instrumen Pendanaan yang dibentuk Pemerintah bersama United Nations dan World Bank untuk pengumpulan dan penyaluran hibah langsung pascabencana • Tim Pengarah IMDFF-DR belum membuat kesepakatan tentang perubahan MoU IMDFF-DR
Payung hukum Tim Koordinasi PHPB sebagai pengendali IDMF	Penerbitan SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana (TK-PHPB) untuk menggantikan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR

Aspek Kelembagaan	
Organisasi Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat ini, fungsi Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR berdasarkan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 masih berlaku • Organisasi Tim Koordinasi PHPB masih menunggu terbitnya revisi SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020 • Keanggotaan inti Tim Koordinasi PHPB terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, BNPB dan Kementerian Keuangan, didukung pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 yang sesuai dengan bidang perencanaan, pengendalian dan pendanaan penanggulangan bencana
Organisasi Sekretariat TK-PHPB	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi PHPB ditetapkan oleh BNPB berdasarkan fungsi dan peran kelembagaan yang ditetapkan dalam SK Tim Koordinasi PHPB
Aspek Pendanaan	
Aspek pendanaan	Sumber dan jenis pendanaan kegiatan Tim Koordinasi PHPB adalah APBN Bappenas, BNPB dan sumber lain yang syah.

II.2. Status pada Triwulan II-2020 dan rekomendasi tindak lanjut untuk Triwulan III-2020

Aspek Payung Hukum		
Status MoU antara Pemerintah-United Nations dan World Bank tentang IMDFF-DR tahun 2009	<p>Status pada Triwulan II-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> MoU IMDFF-DR masih berlaku Pada saat ini, fungsi Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR berdasarkan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 masih berlaku 	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut</p> <p>Tim Pengarah IMDFF-DR yang dibentuk berdasarkan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 perlu menyepakati tindaklanjut terhadap MoU IMDFF-DR</p>
Payung hukum Tim Koordinasi PHPB pelaksana IDMF	<p>Status pada Triwulan II-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan revisi SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020 telah disampaikan oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas kepada Biro Hukum Bappenas IDMF yang dikelola Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Penanggulangan 	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut</p> <p>Memantau proses penerbitan revisi SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020 pada Biro Hukum Bappenas</p>

	<p>Bencana adalah Instrumen Koordinasi yang dibentuk Pemerintah untuk pengelolaan hibah penanggulangan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> IDMF tidak memiliki karakteristik sebagai instrumen pendanaan berdasarkan definisi Trust Fund maupun kriteria yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2020 tentang Dana Perwalian 	
Aspek Kelembagaan		
Tim Koordinasi PHPB	<p>Status pada Triwulan II-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Tim Koordinasi PHPB belum terbentuk karena revisi SK belum diterbitkan 	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> Memantau proses penerbitan revisi SK pada Biro Hukum Bappenas Setelah revisi SK diterbitkan melaksanakan konsolidasi internal di Bappenas untuk persiapan sosialisasi Tim Koordinasi PHPB ke BNPB dan Kementerian Keuangan Melaksanakan kegiatan sosialisasi Tim Koordinasi PHPB

Pedoman Pelaksanaan Tim Koordinasi PHPB	Status pada Triwulan II-2020 <ul style="list-style-type: none"> Konsep awal pedoman komunikasi untuk pengelolaan Single Project telah disusun pada Triwulan I-2020 	Rekomendasi Tindak Lanjut Tim Pelaksana perlu mengidentifikasi jenis pedoman yang diperlukan TK-PHPB untuk segera disusun
Sekretariat TK-PHPB di BNPB	Status pada Triwulan II-2020 Sekretariat PHPB di BNPB belum terbentuk	Rekomendasi Tindak Lanjut BNPB mengidentifikasi keanggotaan Sekretariat TK-PHPB sesuai fungsi dan peran IDMF
Aspek Pendanaan		
Sumber-sumber pendanaan kegiatan TK-PHPB	Status pada Triwulan II-2020 <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembahasan perpanjangan Proyek ENSURE-UNDP (pembiayaan UN Window) sampai dengan Desember 2020 Belum di-identifikasi sumber potensial lainnya 	Rekomendasi Tindak Lanjut <ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan ENSURE Project Document extension sampai dengan Desember 2020 Mengidentifikasi dan menyepakati sumber potensial lainnya

III- Pengelolaan dan Penguatan Sekretariat di BNPB

Pengelolaan dan penguatan Sekretariat di BNPB erat kaitannya dengan rencana transisi IMDFF-DR menjadi IDMF. Status pengelolaan dan penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB pada Triwulan II-2020 adalah sebagai berikut:

Aspek Payung Hukum		
Payung hukum Sekretariat di BNPB	Status pada Triwulan II-2020 Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dalam keadaan status quo sejak Triwulan I-2020 karena SK Sestama BNPB Nomor 99.A/2019; 99.b/2019 dan SK Sestama BNPB Nomor 165.A/2019) tentang pelaksanaan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB dan Penetapan Personil Pelaksana Sekretariat IMDFF-DR telah berakhir masa berlakunya pada Tahun Anggaran 2019	Rekomendasi Tindak Lanjut Menunggu penerbitan revisi SK MPPN untuk pembentukan Tim Koordinasi PHPB sebagai acuan penyusunan payung hukum pembentukan Sekretariat TK-PHPB di BNPB

Aspek Kelembagaan		
Sekretariat TK-PHPB di BNPB	<p>Status pada Triwulan II-2020</p> <p>Sekretariat TK-PHPB di BNPB belum terbentuk</p>	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • BNPB mengidentifikasi keanggotaan Sekretariat TK-PHPB sesuai fungsi dan peran IDMF • BNPB tetap melaksanakan fungsi sebagai Executing Agency bagi proyek PETRA
Aspek Pendanaan		
Sumber-sumber pendanaan kegiatan TK-PHPB	<p>Status pada Triwulan II-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembahasan perpanjangan Proyek ENSURE-UNDP (pembiayaan UN Window) sampai dengan Desember 2020 • Melakukan reaktivasi domain situs IMDFF-DR • Menyusun bahan publikasi tentang IDMF 	<p>Rekomendasi Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi sumber potensial lainnya untuk dilaporkan kepada Tim Teknis IMDFF-DR atau Tim Pelaksana TK-PHPB • Melakukan persiapan untuk sosialisasi IDMF • Melakukan fasilitasi bagi migrasi situs IMDFF-DR ke BNPB

IV- Perkembangan Pelaksanaan Hibah yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR

Saat ini hibah-hibah yang sedang berjalan dan dikoordinasikan oleh IMDFF-DR adalah Proyek ENSURE dan Proyek PETRA dengan implementing agency UNDP dan executing agency BNPB. Berikut disampaikan ringkasan capaian pelaksanaan hibah-hibah tersebut, sebagai berikut:

1. Proyek Proyek Enhancing the IMDFF-DR Secretariat Support Capacity for Post-Disaster Recovery Governance (ENSURE)

Aspek	Status pada Triwulan II-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
Pelaksanaan Rapat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Rapat Teknis Terkait Pembahasan finalisasi Revisi SK MPPN tentang PHPB serta pengajuan SK Sestama BNPB untuk sekretariat• Terlaksananya Rapat Teknis Pembahasan Handover Asset dari UNDP kepada Sekretariat IMDFF-DR• Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan keberlanjutan IMDFF-DR di BNPB dan Pembahasan Komponen 2 dari Proyek PETRA	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan materi Rapat Advisory Board Meeting Proyek PETRA yang akan disampaikan Kepada Ketua Tim Pengarah dan Wakil Ketua Tim Pengarah.• Melanjutkan Rapat Koordinasi Teknis Sekretariat terkait pemberian nomor asset yang telah di handover.• Rencana Rapat Teknis mingguan lanjutan keberlanjutan dan penguatan serta peralihan IMDFF-DR kepada TK-PHPB.• Rencana Rapat Pembahasan BAST asset IMDFF-DR (Proyek ENSURE) kepada BNPB melibatkan Biro Perencanaan dan Biro Umum.

Aspek	Status pada Triwulan II-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
Penguatan Sekretariat IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan ruangan dan peralatan pendukung kantor Sekretariat IMDFF-DR di BNPB. • Penugasan tenaga teknis pendukung Sekretariat IMDFF-DR di BNPB untuk keperluan penyusunan materi koordinasi, analisis dan pelaporan 	Melanjutkan penugasan Tenaga teknis pendukung Sekretariat untuk mendukung tugas Sekretariat TK-PHPB
Publikasi dan Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktivasi domain situs IMDFF-DR • Penyusunan bahan publikasi IDMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan untuk migrasi situs IMDFF-DR ke BNPB • Melanjutkan penyusunan bahan sosialisasi IDMF dan TK-PHPB • Membantu Tim Teknis IMDFF-DR/Tim Pelaksana TK-PHPB menyusun materi sosialisasi
Monev dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi laporan Triwulan I-2020 proyek PETRA • Persiapan penyusunan laporan IMDFF-DR Triwulan II-2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan IMDFF-DR Triwulan II-2020 kepada Tim Teknis IMDFF-DR • Mengevaluasi laporan proyek PETRA dan memberikan masukan bagi BNPB selaku Executing Agency

2. Proyek Sulawesi-Lombok Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

No	Lokasi	Kegiatan	Status pada Triwulan II-2020	Rencana Triwulan III-2020
1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Output 1: Rekonstruksi 13 unit infrastruktur publik (1 puskesmas, 8 pustu dan 4 SMKN)	Dalam proses lelang konstruksi di media dan website UNDP s.d 9 Juli 2020.	Koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi.
		Output 2: Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.	UNDP telah menyampaikan surat permohonan persetujuan usulan kegiatan output 2 kepada Ketua Tim Pengarah dan Deputi RR BNPB pertanggal 12 Mei 2020. BNPB	Berkoordinasi dengan executing agency agar segera menyampaikan tanggapan terkait usulan kegiatan output 2.
2.	Provinsi Sulawesi Tengah	Output 1: Rekonstruksi 27 infrastruktur publik (2 rumah sakit, 2 puskesmas,	2 rumah sakit (RS. Anutapura dan RS Torabelo) dalam proses lelang konstruksi di media dan website UNDP s.d 6 Juli 2020 sedangkan 25 infrastruktur lainnya masih dalam	Koordinasi persiapan pelaksanaan konstruksi.

No	Lokasi	Kegiatan	Status pada Triwulan II-2020	Rencana Triwulan III-2020
		21 sekolah dan 2 tempat pengolahan sampah/TPA)	proses finalisasi DED dan persiapan lelang.	
		Output 2: Pemulihan infrastruktur komunitas pendukung mata pencaharian.	UNDP telah menyampaikan surat permohonan persetujuan usulan kegiatan output 2 kepada Ketua Tim Pengarah dan Deputi RR BNPB pertanggal 12 Mei 2020. Internal Kedeputian RR masih menelaah usulan UNDP tersebut.	Berkoordinasi dengan executing agency agar segera menyampaikan tanggapan terkait usulan kegiatan output 2.
	Rekomendasi kepada executing agency		Masa berlaku dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur di NTB sudah berakhir pada tahun 2019, sehingga perlu segera dilakukan perpanjangan dokumen tersebut sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	

V- Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya

Beberapa kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pengelolaan Hibah lainnya yang dikoordinasikan oleh IMDFF-DR diantaranya:

1. Rencana hibah baru dari Pemerintah Qatar (berdasarkan Surat Kedubes Qatar tanggal 5 Juli 2019 kepada KEMENLU RI) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (sebesar USD 5.000.000);
2. Rencana hibah baru dari Pemerintah New Zealand (berdasarkan Surat Kedubes Selandia Baru tanggal 14 Februari 2019 kepada Ketua Tim Pengarah IMDFF-DR di BAPPENAS) untuk pemulihan di Sulawesi Tengah (sebesar NZD 1.480.000)

Kedua rencana hibah baru tersebut menyetujui untuk pemanfaatan kapasitas IMDFF-DR dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan hibah pascabencana. Adapun ringkasan kegiatan koordinasi selama Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek	Status pada Triwulan II-2020	Rekomendasi untuk Triwulan III-2020
Koordinasi Sekretariat IMDFF-DR bersama Biro HOK, Direktorat PRR BNPB dan Direktorat terkait lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Hibah IMDFF-DR serta lanjutan kegiatan PETRA-UNDP, pada 17 Juni 2020. Rapat Koordinasi tersebut merupakan sinergi program dan kegiatan pemulihan paska bencana yang didanai melalui hibah langsung yang difasilitasi oleh IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pelaksanaan Rapat Teknis Pembahasan List Prioritas proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemanfaatan Hibah Qatar bersama kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi• Rencana Pelaksanaan koordinasi bersama NZMFAT dan UGM terkait rencana pembahasan DRAFT PA dan rencana

	<p>dari mitra pembangunan bilateral/multilateral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemerinterian Luar Negeri telah menerima masukan dari Sekretariat perihal bahwa kewenangan penetapan list prioritas proyek rehabilitasi dan rekonstruksi adalah melalui kedeputian rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Surat Kementerian Luar Negeri kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB tertanggal 16 Juni 2020. 	<p>implementasi hibah paska Pandemi COVID-19.</p>
<p>Reviu substansi usulan calon Pemberi Hibah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Bersama Sekretariat IMDFF-DR bersama Direktorat Timur Tengah, Kemerinterian Luar Negeri • Konfirmasi perkembangan Hibah Qatar setelah Nota Diplomatik 28 November 2019 dan 2 Desember 2019, serta rencana finalisasi MoU Qatar dan BNPB 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Rapat Teknis Pembahasan Tindak lanjut paska pengiriman List Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB kepada Kementerian Luar Negeri
<p>Penandatanganan perjanjian hibah</p>	<p>Belum terlaksana karena pandemi COVID-19</p>	<p>Rencana Penandatanganan MoU Hibah Qatar dan Partnership Arrangement Hibah</p>

		NZMFAT pada akhir Triwulan III Tahun 2020.
Registrasi Naskah Perjanjian Hibah oleh Executing Agency	Belum terlaksana karena pandemi COVID-19	Rencana Rapat teknis sekretariat bersama direktorat dan Biro terkait perihal dukungan substansi dan teknis registrasi Hibah kepada Direktorat EAS Kementerian Keuangan
Rapat Koordinasi dan Pelaporan Hibah Langsung dan Terencana (PHPB)	Telah terlaksana persiapan melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Peningkatan dan Pemulihan Fisik BNPB pada 17 Juni 2020, yang masih memerlukan tindak lanjut untuk tingkat eselon I dan keseluruhan direktorat di BNPB	Rapat Lanjutan bersama Biro Perencanaan dan Direktorat terkait tentang rencana teknis Sosialisasi SK MPPN tentang Tim Pengelolaan Hibah Penanggulangan Bencana

VI- Koordinasi Internal dan Pelaporan

Selama Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 telah dilaksanakan rapat sekretariat secara virtual dan tatap muka dengan jadwal, agenda dan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
1	16 April 2020, Penyesuaian Rencana Kerja sekretariat selama pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Rapat Koordinasi akan diselenggarakan secara virtual (online) dan tatap muka (di BNPB) • Penyusunan Laporan Triwulan I
2	27 April 2020 (Virtual/ Online) , Penyiapan materi Musrenbangnas terkait perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan perkembangan terkini pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah • Daftar inventarisasi masalah setahun setelah implementasi rencana Induk untuk pemulihan paska bencana di Sulawesi Tengah
3	30 April 2020 (Virtual/ Online), Pembahasan Rencana Kerja dan rencana Outline Laporan Triwulan I Tahun 2020 sekretariat IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagian tugas penulisan laporan triwulan I tahun 2020 oleh konsultasn teknis pendukung • Penyiapan nota dinas penyampaian laporan dari kepala sekretariat kepada Sestama BNPB • Penyiapan surat pengantar penyampaian laporan tahun 2019, triwulan I 2020 dari kepala sekretariat kepada ketua Tim Teknis
4	5 Mei 2020 (Virtual/ Online), Penyiapan pelaporan dari UNDP PETRA, terkait Laporan Tahun 2019, dan persetujuan komponen 2 PETRA	<ul style="list-style-type: none"> • UNDP akan menyurati BNPB dan BAPPENAS (Tim Pengarah) untuk penyampaian laporan Proyek UNDP PETRA tahun 2019 • UNDP juga akan menyampaikan surat permohonan persetujuan implementasi Komponen 2 UNDP PETRA di Sulawesi Tengah dan Nusa

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
		Tenggara Barat yang telah diverifikasi oleh Sekretariat IMDFF-DR (BAPPENAS, BNPB), UNDP dan Pemerintah Daerah setempat.
5	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Mei 2020 (Virtual/ Online), • Penyiapan Laporan dari Sekretariat kepada Tim Teknis dan Bapak Sestama BNPB, perihal kondisi terkini sekretariat IMDFF-DR, penyampaian laporan IMDFF-DR Tahun 2019 dan Laporan Triwulan I Tahun 2020 • Pembahasan Revisi SK MPPN No.51/2020 tentang LP3B 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Nota Dinas laporan terkait berakhirnya SK 99.A dan 99.B terkait pengelolaan IMDFF-DR di BNPB dan pembaharuannya. • Penyampaian Laporan Tahun 2019 dan Laporan Triwulan I Tahun 2020 dari Sekretariat IMDFF-DR • Penyampaian status koordinasi Hibah NZ dan Qatar yang memerlukan penandatanganan MoU dalam waktu dekat. • Penyampaian kebutuhan No Cost Extension Dokumen Proyek ENSURE. • Penyiapan substansi revisi SK LP3B menjadi TK PHPB.
6	11, 14, 19 Mei 2020 di Sekretariat BNPB (Kepala Sekretariat dan Tenaga Teknis Pendukung) Membahas penyiapan Nota Dinas kepada Sestama dan Surat kepada Ketua Tim Teknis dari Kepala Sekretariat	Revisi dan pengiriman Nota Dinas ke Sestama BNPB dan Surat kepada Ketua Tim Teknis di Bappenas

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
7	27 Mei 2020 secara virtual/ online, Finalisasi substansi perubahan SK MPPN No.51/2020 tentang LP3B	Finalisasi substansi revisi pada kosideran dan diagram organisasi SK dan Kerangka acuan kegiatan LP3B menjadi TKPHPB.
8	10 Juni 2020 , Rapat Virtual/ Online, Penatausahaan Hibah Barang dan Jasa dari Proyek ENSURE kepada Sekretariat IMDFF-DR	<ul style="list-style-type: none"> • UNDP akan menyiapkan detail list asset/ barang yang akan diserahterimakan minus 8 item yang belum di delivery. • Sekretariat IMDFF-DR akan menyiapkan Notulensi dan Surat Permintaan kepada UNDP untuk handover asset/barang yang telah di terima sekretariat. • UNDP akan berkonsultasi dengan UNRC dan selanjutnya akan menyurati Sestama BNPB terkait permintaan perpanjangan prodoc ENSURE. • Sekretariat akan menyiapkan Draft perubahan prodoc (rencana kegiatan dan realokasi pendanaan sesuai dengan dana yang tersedia). Draft perubahan Prodoc direncanakan Januari sampai Desember 2020.
9	17 Juni 2020, Rapat Virtual/ Online, rapat koordinasi kegiatan IMDFF-DR dengan agenda pembahasan keberlanjutan IMDFF-DR dan perkembangan pelaksanaan PETRA	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pembiayaan hibah dari UNDP maupun hibah-hibah lainnya merupakan peluang dan kekuatan sumberdaya untuk mendukung pemulihan pascabencana di daerah yang perlu dioptimalkan oleh BNPB.

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
	<p>UNPD. Rapat ini dibuka oleh Bapak Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan dihadiri peserta dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, Biro Perencanaan BNPB, Biro HOKS BNPB, Direktorat DTTP Bappenas, Perwakilan UNDP dan Sekretariat IMDFF-DR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan UNDP-PETRA di Sulawesi Tengah dan NTB sudah berjalan dengan baik. Agar dilakukan percepatan pelaksanaan dilapangan dan permasalahan administrasi tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan dalam pemulihan di NTB dan Sulteng. • Bappenas telah menyiapkan draft SK Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Tim Koordinasi PHPB yang saat ini masih dalam proses penetapan di Bappenas dan diharapkan akan segera selesai dalam waktu dekat ini. • Terkait regulasi dan kelembagaan Tim Koordinasi PHPB di BNPB, perlu segera diterbitkan SK Sestama BNPB mengenai pembentukan dan penetapan personil pelaksana Sekretariat Tim Koordinasi PHPB. Agar segera menyusun draft SK Sestama BNPB mengenai pembentukan dan penetapan personil Sekretariat Tim Koordinasi PHPB oleh Kedeputian RR, Biro Perencanaan, Direktorat DTTP Bappenas dan Sekretariat. • Untuk kebutuhan operasionalisasi Sekretariat TK PHPB diperlukan dukungan biaya operasional baik dari APBN Bappenas maupun APBN BNPB serta mengoptimalkan dukungan pembiayaan lainnya. Bappenas telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional Tim Koordinasi PHPB, diharapkan BNPB juga dapat

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
		<p>mengalokasikan dukungan anggaran pada Biro Perencanaan BNPB untuk pembiayaan operasionalisasi Sekretariat Tim Koordinasi PHPB di BNPB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat potensi hibah-hibah yang dapat dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi PHPB, baik hibah yang sudah berjalan (PETRA-UNDP sebesar USD 28 juta dan ENSURE USD 202 ribu), rencana hibah (yang masih proses <i>pipeline</i>) dari pemerintah New Zealand sebesar NZD 1,5 juta dan pemerintah Qatar sebesar USD 5 juta, maupun potensi hibah yang prospektif (dukungan untuk penanganan Covid19 dari AIFDR-DFAT), agar segera dilakukan percepatan dan melakukan pemetaan potensi donor yang prospektif di BNPB. • Prodoc ENSURE telah berakhir pada tahun 2019, oleh karena itu perlu segera dilakukan perpanjangan dokumen prodoc ENSURE dan penandatanganan perpanjangan prodoc ENSURE tersebut. • Agar berkoordinasi dengan UNDP untuk rencana pelaksanaan project board meeting proyek PETRA. • Perlu dilaksanakan pertemuan Tim Teknis dan Tim Pengarah Tim Koordinasi PHPB untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut terkait isu-isu permasalahan dalam rangka percepatan

No	Tanggal dan Agenda	Hasil dan tindak lanjut
10	25 Juni 2019, Rapat Virtual/ Online, Membahas Persiapan Advisory Board Meeting PETRA Project Bersama BAPPENAS, BNPB dan UNDP level Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Nota Dinas dari Dir. DTTP kepada Deputi Regional perihal substansi strategis dari ABM pertama proyek PETRA. • Persetujuan terhadap komponen II yang memerlukan persetujuan Ketua SC dan anggota. • Alternative penyiapan Rapat Teknis membahas substansi yang akan disiapkan pada ABM.

VII- Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020

Kesimpulan pelaksanaan rencana kerja IMDFF-DR pada Triwulan II-2020 dan rekomendasi tindak lanjut untuk Triwulan III-2020 adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
1	Rencana Transisi IMDFF-DR menjadi IDMF	
	Status IMDFF-DR sebagai instrumen pendanaan: <ul style="list-style-type: none"> • MoU IMDFF-DR masih berlaku 	Tim Pengarah IMDFF-DR yang dibentuk berdasarkan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 perlu menyepakati tindaklanjut terhadap MoU IMDFF-DR

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
	<ul style="list-style-type: none"> Pada saat ini, fungsi Tim Pengarah dan Tim Teknis IMDFF-DR berdasarkan SK MPPN Nomor 8/M.PPN/HK/01/2010 masih berlaku 	
	<p>Usulan revisi SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 51/M.PPN/HK/04/2020 bagi pembentukan Tim Koordinasi PHPB telah disampaikan oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas kepada Biro Hukum Bappenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Memantau penerbitan revisi SK Menteri PPN/Kepala Bappenas bagi pembentukan Tim Koordinasi PHPB Melaksanakan konsolidasi internal di Bappenas untuk persiapan sosialisasi Tim Koordinasi PHPB ke BNPB dan Kementerian Keuangan Tim Teknis IMDFF-DR/Tim Pelaksana TK-PHPB perlu mengidentifikasi fokus IDMF dan jenis pedoman yang diperlukan TK-PHPB Persiapan kegiatan sosialisasi IDMF dan Tim Koordinasi PHPB
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pembahasan perpanjangan Proyek ENSURE-UNDP (pembiayaan UN Window) sampai dengan Desember 2020 Belum di-identifikasi sumber potensial lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan ENSURE Project Document extension sampai dengan Desember 2020 Tim Teknis IMDFF-DR/Tim Pelaksana TK-PHPB mengidentifikasi dan menyepakati sumber potensial lainnya

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
2	Pengelolaan dan penguatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB	
	Sekretariat TK-PHPB di BNPB belum terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> • BNPB mengidentifikasi keanggotaan Sekretariat TK-PHPB sesuai fungsi dan peran IDMF • BNPB tetap melaksanakan fungsi sebagai Executing Agency bagi proyek PETRA
	<p>Dalam rangka kesinambungan dukungan pembiayaan bagi kegiatan Sekretariat IMDFF-DR 2020 di BNPB:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan pembahasan perpanjangan Proyek ENSURE-UNDP (pembiayaan UN Window) sampai dengan Desember 2020 • Belum di-identifikasi sumber potensial lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan ENSURE Project Document extension sampai dengan Desember 2020 • Tim Teknis IMDFF-DR/Tim Pelaksana TK-PHPB mengidentifikasi dan menyepakati sumber potensial lainnya
	<p>Dalam rangka publikasi dan sosialisasi telah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktivasi domain situs IMDFF-DR • Penyusunan bahan publikasi IDMF 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan persiapan untuk migrasi situs IMDFF-DR ke BNPB • Membantu Tim Teknis IMDFF-DR/Tim Pelaksana TK-PHPB menyusun materi sosialisasi IDMF
	Pelaksanaan Handover Asset melalui Proyek ENSURE dari UNDP kepada Sekretariat IMDFF-DR	Melaksanakan Rapat Persiapan lanjutan proses BAST Asset yang telah di handover kepada BNPB melalui Biro Perencanaan dan Biro Umum

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
3	Perkembangan pelaksanaan kegiatan hibah yang dikoordinasikan IMDFF-DR	
	Pembahasan usulan perpanjangan proyek ENSURE sampai dengan Desember 2020	Penandatanganan ENSURE Project Document Extension
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan pelaksanaan Project PETRA dilaksanakan Executing Agency secara virtual. • Pelaksanaan kegiatan PETRA mengalami keterlambatan sehubungan dengan pandemic covid-19. Kegiatan output 1 di NTB dan 2 rumah sakit di Sulawesi Tengah sudah masuk tahap lelang konstruksi di media dan website, sedangkan paket kegiatan lainnya masih dalam proses finalisasi DED dan persiapan dokumen lelang. • Usulan kegiatan output 2 masih dalam proses penelaahan oleh Kedeputian RR BNPB. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan pemantauan pelaksanaan kegiatan Project PETRA pada Triwulan III-2020 • Koordinasi dengan executing agency untuk perpanjangan dokumen R3P Kabupaten Lombok dan Kabupaten Lombok Timur di NTB. • Fasilitasi dan koordinasi dengan executing agency agar menyampaikan tanggapan terkait permohonan persetujuan usulan kegiatan output 2 Proyek PETRA dari UNDP.
4	Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Lainnya	
	Koordinasi Sekretariat IMDFF-DR dengan UKE II terkait di BNPB	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis penentuan proyek prioritas yang akan dilaksanakan melalui Hibah Qatar untuk Pemulihan pasaka Bencana di NTB dan Sulteng

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
	Reviu substansi usulan calon Pemberi Hibah	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan koordinasi dengan direktorat terkait di Kementerian Luar Negeri tentang tindak lanjut Hibah Qatar • Melanjutkan koordinasi dengan NZ embassy dan UGM terkait substansi kegiatan dari pemanfaatan hibah dan rencana pelibatan Pusdiklat dalam pelaksanaan Hibah.
5	Koordinasi Internal dan Pelaporan	
	Pelaksanaan rapat Sekretariat rutin sesuai keperluan	Melanjutkan pembahasan tentang isu yang tertunda pada Triwulan II-2020
	Belum pernah dilaksanakan rapat Tim Teknis IMDFF-DR	<p>Menyelenggarakan rapat Tim Teknis dengan agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi tentang fokus dan ruang lingkup pengelolaan hibah IDMF • Penyusunan rekomendasi terhadap MoU IMDFF-DR bagi Tim Pengarah • Mengidentifikasi pedoman yang diperlukan bagi operasionalisasi IDMF • Persiapan sosialisasi TK-PHPB

No	Pelaksanaan pada Triwulan II-2020	Rekomendasi Tindak Lanjut pada Triwulan III-2020
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi sumber pendanaan non-APBN bagi pelaksanaan kegiatan TK-PHPB
	Belum pernah dilaksanakan rapat Tim Pengarah IMDFF-DR	Menyelenggarakan rapat Tim Pengarah dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian kinerja IMDFF-DR pada Triwulan II-2020 • Menyepakati tindak lanjut terhadap MoU IMDFF-DR • Menyepakati fokus dan ruang lingkup pengelolaan hibah IDMF • Pelaksanaan sosialisasi IDMF dan TK-PHPB
	Penyusunan Laporan Triwulan II-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Triwulan III-2020

VIII- Laporan Keuangan Proyek ENSURE Triwulan II Tahun 2020 dalam rangka mendukung kegiatan Sekretariat IMDFF-DR

Dengan pertimbangan bahwa Proyek ENSURE dengan UNDP selaku Implementing Agency adalah sumber pendanaan kegiatan Sekretariat IMDFF-DR di BNPB. Adapun sisa dana hingga akhir Triwulan II (April-Juni) Tahun 2020 sebesar USD 48.148, bersama ini disampaikan status keuangan per 30 Juni 2020 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut ini:

JOINT PROJECT BUDGET*							
Total Resources for the transfer (US\$)		203,626					
% of Indirect Costs		7					
Total Indirect Costs		14,254					
Total Direct Costs		189,372					
PROJECT BUDGET		ESTIMATED UTILIZATION OF RESOURCES (US\$)		Total Budget	Expenditure as of 30 June 2020	Commitment as of 30 June 2020	Balance
CATEGORY	Remaining Balance from MPTF	Remaining Balance from WB Trust Fund					
1	Staff and other personnel costs		80,000.00	80,000.00	45,529.45	22,663.81	11,806.74
2	Supplies, Commodities, Materials	60,000.00		60,000.00	49,224.99	0	10,775.01
3	Equipment, Vehicles and Furniture including Depreciation	10,000.00		10,000.00	10,282.73	-	(282.73)
4	Contractual Services			-			-
5	Travel	24,673.00	11,625.86	36,298.86	13,025.90	-	23,272.96
6	Transfers and Grants to Counterparts			-			-
7	General Operating and Other Direct Costs	10,000.00		10,000.00	6,044.00		3,956.00
Total Programme Costs		104,673.00	91,625.86	196,298.86	124,107.07	22,663.81	49,527.98
8	Indirect Support Costs**	7,327.11		7,327.11	8,707.00		(1,379.89)
TOTAL Pass-Through Amount Approved		112,000.11	91,625.86	203,625.97	132,814.07	22,663.81	48,148.09

Sumber : UNDP Indonesia, Juni 2020